



# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD



2

0

2

2

DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH

## DAFTAR ISI

### I Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran

### II Laporan Realisasi Anggaran SKPD

### III Neraca Komparatif SKPD

### IV Laporan Operasional SKPD

### V Laporan Perubahan Ekuitas SKPD

### VI Catatan Atas Laporan Keuangan

<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	5
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	6
<b>Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan.....</b>	<b>8</b>
2.1 Ekonomi Makro.....	8
2.2 Kebijakan Keuangan.....	9
<b>Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....</b>	<b>12</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	
Secara Umum.....	12
3.2 Hambaran dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian	
Target yang Telah Ditetapkan.....	18
<b>BAB IV Kebijakan Akuntansi.....</b>	<b>20</b>
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD.....	20
4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan	
Laporan Keuangan SKPD.....	20
4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan SKPD.....	21
<b>BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....</b>	<b>29</b>
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	29
5.1.1 Pendapatan.....	29
5.1.2 Belanja.....	32
5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	45
5.2.1 Aset.....	45
5.2.2 Kewajiban.....	74
5.2.3 Ekuitas Dana.....	74
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	75

5.3.1 Pendapatan.....	75
5.3.2 Beban.....	79
5.3.3 Surplus Defisit Non Operasional.....	88
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	89
<b>BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan.....</b>	<b>92</b>
<b>BAB VII Penutup.....</b>	<b>97</b>
<b>VII Lampiran</b>	



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN**  
**CIPTA KARYA**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368  
Faksimile 024-7613181 Laman <http://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [dpubinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubinmarcipka@jatengprov.go.id)

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan keuangan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 31 Desember 2022

**PENGGUNA ANGGARAN**



**Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661129 199203 1 005



**DINAS BINA MARGA DAN CIPTAKARYA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
3	Pajak Daerah		-	-	#DIV/0!	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-	#DIV/0!	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-	#DIV/0!	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-	#DIV/0!	-
7	Pajak Air Permukaan		-	-	#DIV/0!	-
8	Pajak Rokok		-	-	#DIV/0!	-
9	Retribusi Daerah		6.538.650.000,00	8.162.613.237,00	124,84	7.052.041.238,00
10	Retribusi Jasa Umum		-	-	#DIV/0!	-
11	Retribusi Jasa Usaha		6.538.650.000,00	8.162.613.237,00	124,84	7.052.041.238,00
12	Retribusi Perizinan Tertentu		-	-	#DIV/0!	-
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penvertaan Modal pada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penvertaan Modal pada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penvertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		-	-	#DIV/0!	-
17	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		61.735.000,00	146.601.560,00	237,47	324.962.000,00
18	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		61.735.000,00	146.601.560,00	237,47	324.962.000,00
19	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
20	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
21	Hasil Kerja Sama Daerah		-	-	#DIV/0!	-
22	Jasa Giro		-	-	#DIV/0!	-
23	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	#DIV/0!	-
24	Pendapatan Bunga		-	-	#DIV/0!	-
25	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-	#DIV/0!	-
26	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		-	-	#DIV/0!	-
27	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing		-	-	#DIV/0!	-
28	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-	#DIV/0!	-
29	Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-	#DIV/0!	-
30	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-	#DIV/0!	-
31	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-	#DIV/0!	-
32	Pendapatan dari Pengembalian		-	-	#DIV/0!	-
33	Pendapatan BLUD		-	-	#DIV/0!	-
34	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
35	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-	#DIV/0!	-
36	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	#DIV/0!	-
37	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-	#DIV/0!	-
38	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-	#DIV/0!	-
39	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf		-	-	#DIV/0!	-
40	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>6.600.385.000,00</b>	<b>8.309.214.797,00</b>	<b>125,89</b>	<b>7.377.003.238,00</b>
41						
42	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
43	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
44	Dana Perimbangan		-	-	#DIV/0!	-
45	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	#DIV/0!	-
46	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	#DIV/0!	-
47	Pendapatan Bagi Hasil		-	-	#DIV/0!	-
48	Bantuan Keuangan		-	-	#DIV/0!	-
49	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		-	-	<b>#DIV/0!</b>	-
50						
51	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
52	Pendapatan Hibah		-	-	#DIV/0!	-
53	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
54	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
55	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	-	#DIV/0!	-
56	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		-	-	#DIV/0!	-
57	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		-	-	#DIV/0!	-
58	Dana Darurat		-	-	#DIV/0!	-
59	Dana Darurat		-	-	#DIV/0!	-
60	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	#DIV/0!	-
61	Lain-lain Pendapatan		-	-	#DIV/0!	-
62	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>		-	-	<b>#DIV/0!</b>	-
63						
64	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>6.600.385.000,00</b>	<b>8.309.214.797,00</b>	<b>125,89</b>	<b>7.377.003.238,00</b>
65						
66	<b>BELANJA DAERAH</b>					
67	<b>BELANJA OPERASI</b>					
68	Belanja Pegawai		79.123.950.000,00	74.570.717.861,00	94,25	79.414.476.160,00
69	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		38.733.045.000,00	36.154.835.978,00	93,34	41.258.508.362,00
70	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		37.660.505.000,00	36.687.261.883,00	97,42	38.155.967.798,00
71	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		2.730.400.000,00	1.728.620.000,00	63,31	-
72	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	#DIV/0!	-
73	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	#DIV/0!	-
74	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	#DIV/0!	-
75	Belanja Pegawai BOS		-	-	#DIV/0!	-
76	Belanja Pegawai BLUD		-	-	#DIV/0!	-
77	Belanja Barang dan Jasa		185.297.620.000,00	179.900.839.194,00	97,09	162.705.797.848,00
78	Belanja Barang		9.434.209.000,00	9.032.784.314,00	95,75	14.346.782.695,00
79	Belanja Jasa		22.468.976.000,00	21.040.264.938,00	93,64	18.909.569.165,00
80	Belanja Pemeliharaan		148.315.619.000,00	145.162.101.481,00	97,87	110.414.195.066,00
81	Belanja Perjalanan Dinas		5.060.816.000,00	4.647.688.461,00	91,84	3.897.498.222,00
82	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	15.137.752.700,00
83	Belanja Barang dan Jasa BOP		-	-	#DIV/0!	-
84	Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-	#DIV/0!	-
85	Belanja Barang dan Jasa BLUD		-	-	#DIV/0!	-
86	Belanja Bunga		-	-	#DIV/0!	-
87	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
88	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	#DIV/0!	-
89	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	#DIV/0!	-
90	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	#DIV/0!	-
91	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	#DIV/0!	-
92	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	#DIV/0!	-
93	Belanja Subsidi		-	-	#DIV/0!	-

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
94	Belanja Subsidi kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
95	Belanja Subsidi kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
96	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	#DIV/0!	-
97	Belanja Subsidi kepada Kpperasi		-	-	#DIV/0!	-
98	Belanja Hibah		-	-	#DIV/0!	-
99	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
100	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
101	Belanja Hibah kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
102	Belanja Hibah kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
103	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		-	-	#DIV/0!	-
104	Belanja Hibah Dana BOS		-	-	#DIV/0!	-
105	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	#DIV/0!	-
106	Belanja Bantuan Sosial		-	-	#DIV/0!	-
107	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		-	-	#DIV/0!	-
108	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-	#DIV/0!	-
109	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
110	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-	#DIV/0!	-
111	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>264.421.570.000,00</b>	<b>254.471.557.055,00</b>	<b>96,24</b>	<b>242.120.274.008,00</b>
112						
113	<b>BELANJA MODAL</b>					
114	Belanja Modal Tanah		43.957.320.000,00	13.607.885.183,00	30,96	55.703.798.625,00
115	Belanja Modal Tanah		43.957.320.000,00	13.607.885.183,00	30,96	55.703.798.625,00
116	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		27.439.904.000,00	27.051.485.930,00	98,58	4.540.535.500,00
117	Belanja Modal Alat Besar		10.115.735.000,00	10.022.209.545,00	99,08	251.707.500,00
118	Belanja Modal Alat Angkutan		9.239.374.000,00	9.158.974.000,00	99,13	1.887.888.000,00
119	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		33.500.000,00	31.004.296,00	92,55	-
120	Belanja Modal Alat Pertanian		-	-	#DIV/0!	-
121	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		3.552.052.000,00	3.457.936.989,00	97,35	544.270.000,00
122	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		50.000.000,00	49.913.000,00	99,83	18.000.000,00
123	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	-
124	Belanja Modal Alat Laboratorium		2.152.720.000,00	2.124.651.000,00	98,70	1.515.250.000,00
125	Belanja Modal Alat Persenjataan		-	-	#DIV/0!	-
126	Belanja Modal Komputer		2.295.423.000,00	2.205.697.100,00	96,09	323.420.000,00
127	Belanja Modal Alat Eksplorasi		-	-	#DIV/0!	-
128	Belanja Modal Alat Pengeboran		-	-	#DIV/0!	-
129	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-	#DIV/0!	-
130	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		-	-	#DIV/0!	-
131	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-	#DIV/0!	-
132	Belanja Modal Alat Peraga		-	-	#DIV/0!	-
133	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi		-	-	#DIV/0!	-
134	Belanja Modal Rambu-rambu		-	-	#DIV/0!	-
135	Belanja Modal Peralatan Olahraga		-	-	#DIV/0!	-
136	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		-	-	#DIV/0!	-
137	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		29.963.480.000,00	29.812.422.420,00	99,50	115.013.974.017,00
138	Belanja Modal Gedung		29.963.480.000,00	29.812.422.420,00	99,50	115.013.974.017,00
139	Belanja Modal Monumen		-	-	#DIV/0!	-
140	Belanja Modal Bangunan Menara		-	-	#DIV/0!	-
141	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		-	-	#DIV/0!	-
142	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		425.832.310.000,00	409.614.496.842,00	96,19	296.304.029.610,00
143	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		404.432.215.000,00	388.342.532.847,00	96,02	248.809.611.265,00
144	Belanja Modal Bangunan Air		-	-	#DIV/0!	-
145	Belanja Modal Instalasi		1.000.000.000,00	900.000.000,00	90,00	-
146	Belanja Modal Jaringan		20.400.095.000,00	20.371.963.995,00	99,86	47.494.418.345,00
147	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		20.000.000,00	18.528.350,00	92,64	55.653.941,00
148	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		20.000.000,00	18.528.350,00	92,64	55.653.941,00
149	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		-	-	#DIV/0!	-
150	Belanja Modal Hewan		-	-	#DIV/0!	-
151	Belanja Modal Biota Perairan		-	-	#DIV/0!	-
152	Belanja Modal Tanaman		-	-	#DIV/0!	-
153	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya		-	-	#DIV/0!	-
154	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-	#DIV/0!	-
155	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		-	-	#DIV/0!	-
156	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		-	-	#DIV/0!	-
157	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
158	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud		-	-	#DIV/0!	-
159	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Lain-lain		-	-	#DIV/0!	-
160	<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>527.213.014.000,00</b>	<b>480.104.818.725,00</b>	<b>91,06</b>	<b>471.617.991.693,00</b>
161						
162	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
163	Belanja Tidak Terduga		-	-	#DIV/0!	-
164	Belanja Tidak Terduga		-	-	#DIV/0!	-
165	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>		-	-	#DIV/0!	-
166						
167	<b>BELANJA TRANSFER</b>					
168	Belanja Bagi Hasil		-	-	#DIV/0!	-
169	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-	#DIV/0!	-
170	Belanja Bantuan Keuangan		-	-	#DIV/0!	-
171	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-	#DIV/0!	-
172	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	#DIV/0!	-
173	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-	#DIV/0!	-
174	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	#DIV/0!	-
175	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		-	-	#DIV/0!	-
176	<b>Jumlah Belanja Transfer</b>		-	-	#DIV/0!	-
177						
178	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>791.634.584.000,00</b>	<b>734.576.375.780,00</b>	<b>92,79</b>	<b>713.738.265.701,00</b>
179						
180	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(785.034.199.000,00)</b>	<b>(726.267.160.983,00)</b>	<b>92,51</b>	<b>(706.361.262.463,00)</b>
181						
182	<b>PEME PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
183	<b>PEP PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
184	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-	#DIV/0!	-
185	Pelampauan Penerimaan PAD		-	-	#DIV/0!	-
186	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		-	-	#DIV/0!	-
187	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-	#DIV/0!	-
188	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
189	Penghematan Belanja		-	-	#DIV/0!	-
190	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan		-	-	#DIV/0!	-
191	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Peneluaran Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
192	Sisa Belanja Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
193	Pencairan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
194	Pencairan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
195	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
196	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	#DIV/0!	-
197	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	#DIV/0!	-
198	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	#DIV/0!	-

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
199	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
200	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	#DIV/0!	-
201	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	#DIV/0!	-
202	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	#DIV/0!	-
203	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
204	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	#DIV/0!	-
205	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
206	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
207	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
208	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
209	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		-	-	#DIV/0!	-
210	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
211	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	#DIV/0!	-
212	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Und		-	-	#DIV/0!	-
213	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD		-	-	#DIV/0!	-
214	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		-	-	#DIV/0!	-
215						
216	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
217	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
218	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
219	Penyertaan Modal Daerah		-	-	#DIV/0!	-
220	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	#DIV/0!	-
221	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	#DIV/0!	-
222	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	#DIV/0!	-
223	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
224	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	#DIV/0!	-
225	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	#DIV/0!	-
226	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	#DIV/0!	-
227	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
228	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	#DIV/0!	-
229	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
230	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
231	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
232	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
233	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi		-	-	#DIV/0!	-
234	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
235	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	#DIV/0!	-
236	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-		-	-	#DIV/0!	-
237	Pinjaman BLUD		-	-	#DIV/0!	-
238	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		-	-	#DIV/0!	-
239						
240	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		-	-	#DIV/0!	-
241						
242	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>(785.034.199.000,00)</b>	<b>(726.267.160.983,00)</b>	<b>92,51</b>	<b>(706.361.262.463,00)</b>

\* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

